

MODEL SINERGI PEMBANGUNAN DESA: INTEGRASI INFRASTRUKTUR, PEMBERDAYAAN, DAN PEMBINAAN UNTUK KEBERLANJUTAN

Ahirul Habib Padilah^{1)*}, Riyoldi²⁾, Herri Junius Nge³⁾, Eka Apriyani⁴⁾,
Yustinus Rudiyanto⁵⁾, Nada Azwa Nazari⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6)} Program Studi Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia

*Corresponding authors: ahirul.habib@fisip.untan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merumuskan model sinergi pembangunan desa yang mengintegrasikan tiga elemen utama yaitu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan tata kelola sebagai pendekatan komprehensif untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan. Secara akademis, studi ini penting karena menawarkan cara pandang integratif dalam melihat pembangunan desa yang selama ini sering dipisahkan secara sektoral. Secara praktis, penelitian ini relevan untuk memberikan acuan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi pembangunan yang lebih efektif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menelaah dokumen kebijakan, hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik yang berhubungan dengan pembangunan desa dan penguatan kapasitas masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh keterhubungan ketiga elemen: infrastruktur yang dibangun harus mendukung penguatan kapasitas lokal, pemberdayaan perlu diarahkan pada kemandirian ekonomi dan sosial, serta pembinaan tata kelola diperlukan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan nilai budaya setempat. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur dengan menawarkan model pembangunan integratif yang lebih holistik dan partisipatif. Secara praktis, model ini dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembangunan Desa, Infrastruktur, Pemberdayaan, Pembinaan, Tata Kelola, Keberlanjutan, Model Sinergi

ABSTRACT

This study aims to formulate a synergistic village development model that integrates three key elements infrastructure development, community empowerment, and governance capacity-building as a comprehensive approach to achieving sustainable village development. Academically, this study is significant because it offers an integrative perspective on village development, which has often been approached in a fragmented or sectoral manner. Practically, the research provides relevant guidance for village governments and development stakeholders in designing more effective development strategies. The study employs a qualitative approach through a literature review by examining policy documents, previous research findings, and academic literature related to village development and community capacity strengthening. The findings indicate that the success of village development is largely determined by the interconnection among the three elements: infrastructure must support the enhancement of local capacities; empowerment initiatives should strengthen economic and social independence; and governance capacity-building is needed to ensure transparency, accountability, and alignment with local cultural values. This research contributes to filling gaps in the existing literature by proposing an integrative development model that is more holistic and participatory. Practically, the model can serve as a strategic reference for village governments in formulating sustainable development policies.

Keywords: Village Development, Infrastructure, Empowerment, Capacity-Building, Governance, Sustainability, Synergy Model

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan pilar strategis dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal serta kualitas tata kelola pemerintahan desa. Selama ini pendekatan pembangunan yang terfragmentasi di mana infrastruktur, pemberdayaan, dan pembinaan berjalan secara terpisah sering menghasilkan output yang kurang optimal dan sulit berkelanjutan (Nurhayati, Lutfi, Hidayatullah, dkk., 2025; Rahmat dkk., 2015; Todaro & Smith, 2020). Oleh karena itu, sinergi ketiga elemen tersebut menjadi kunci untuk mencapai pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan kerangka regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Irawan, 2017; Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, t.t.).

Meskipun banyak studi membahas pembangunan desa, sebagian besar penelitian masih dilakukan secara parsial. Kajian terdahulu cenderung menyoroti salah satu aspek saja misalnya pembangunan infrastruktur (Eriza & Saragih, 2019), pemberdayaan Masyarakat (Nurhayati, Lutfi, Pujiriyani, dkk., 2025) atau tata kelola desa (Dharmaningtias dkk., 2018; Irawan, 2017) tanpa membahas interaksi sinergis di antara ketiganya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penelitian sekaligus menunjukkan adanya research gap: bagaimana infrastruktur, pemberdayaan, dan pembinaan dapat diintegrasikan secara sinergis untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa?

Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual sinergi pembangunan desa yang menghubungkan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan tata kelola dalam satu strategi integratif. Model yang dikembangkan diharapkan memberikan kontribusi baru dibandingkan pendekatan parsial atau sektoral sebelumnya, dengan menekankan tiga aspek utama: (1) keterkaitan antar-elemen, (2) penerapan kebijakan dan praktik berbasis bukti, serta (3) penguatan keberlanjutan pembangunan desa (Pradana & Fitriyanti, 2019). Visualisasi model

konseptual disertakan pada bagian hasil untuk memudahkan pemahaman dan implementasi.

Alur argumentasi dalam penelitian ini berfokus pada tiga domain inti. Pertama, infrastruktur berfungsi sebagai fondasi fisik yang mendukung mobilitas, akses layanan publik, dan aktivitas ekonomi lokal (Irawan, 2017; Kunto Arief Wibowo, 2024). Kedua, pemberdayaan masyarakat mencakup pelatihan, peningkatan akses informasi, serta pengembangan usaha lokal yang memungkinkan warga memanfaatkan infrastruktur secara optimal dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketiga, pembinaan tata kelola meliputi pengawasan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas aparatur desa untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan nilai sosial-budaya setempat. Sinergi ketiga domain tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas program pembangunan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan hasil yang dicapai, seperti produktivitas pertanian, kualitas layanan kesehatan, dan pengembangan usaha desa (Aini & Nadida, 2014; Fiyana, 2025; Rachmadi dkk., 2021).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan konteks global membuka peluang baru bagi penguatan sinergi pembangunan desa. Pemanfaatan platform digital dalam perencanaan, monitoring, dan akses pasar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas intervensi Pembangunan (World Bank, 2021). Namun, peluang ini menuntut peningkatan kapasitas aparatur dan warga desa agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai kebutuhan lokal. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian terkait integrasi tiga elemen inti pembangunan desa, menghadirkan novelty melalui model konseptual sinergi yang bersifat holistik dan berbasis bukti, serta memberikan dasar analitis bagi perancang kebijakan dan praktisi dalam merumuskan strategi pembangunan desa yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan (Diantika & Pramono, 2021).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menekankan pemerataan hasil pembangunan dan penguatan kapasitas

masyarakat di tingkat lokal. Pendekatan *community-based development* (Chambers, 1997; Uphoff, 2005), menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan dengan menekankan partisipasi, kemandirian, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Prinsip utamanya adalah bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi dipahami sebagai intervensi eksternal, tetapi sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini berkembang sebagai kritik terhadap model *top-down* yang dominan pada masa pembangunan sentralistik, di mana keputusan pembangunan ditentukan dari pusat tanpa mempertimbangkan konteks lokal (Irawan, 2017; Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Model *bottom-up* yang ditawarkan *community-based development* dianggap lebih efektif karena memberikan otoritas dan rasa kepemilikan kepada masyarakat desa terhadap program pembangunan.

Pada masa lalu, paradigma pembangunan bersifat *top-down* dengan pendekatan “membangun desa.” Desa diposisikan sebagai objek pembangunan, sehingga keputusan, program, dan arah intervensi ditentukan oleh pihak luar tanpa pelibatan bermakna dari masyarakat. Paradigma tersebut kemudian bergeser menjadi “desa membangun,” yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Dalam pendekatan ini, masyarakat desa berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan sesuai kebutuhan, potensi, dan aspirasi mereka sendiri. Pergeseran ini menegaskan pentingnya kedaulatan desa dan partisipasi warga dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan relevan secara lokal.

Selanjutnya, konsep *sustainable rural development* menekankan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekologis (Brundtland, 1987; Todaro & Smith, 2020). Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan perlindungan hak generasi mendatang. Kritik terhadap teori ekonomi klasik menunjukkan bahwa orientasi pertumbuhan semata sering mengabaikan aspek sosial dan lingkungan (Escobar, 2011; Nurhayati, Lutfi, Pujiriyani, dkk., 2025). Karena itu, pembangunan desa berkelanjutan harus memastikan bahwa peningkatan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian sosial-ekologis.

Teori desentralisasi menyediakan kerangka institusional bagi penerapan pembangunan berbasis komunitas di Indonesia. Menurut (Cheema dkk., 1983; Rondinelli, 1981), desentralisasi memungkinkan transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan masyarakat lokal sehingga keputusan pembangunan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan setempat. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Sinergi antara desentralisasi dan partisipasi masyarakat menjadi fondasi bagi pembangunan desa yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Teori Sinergi dalam Pembangunan

Konsep sinergi dalam pembangunan menekankan pentingnya integrasi lintas-sektor dan lintas-aktor untuk mencapai hasil yang optimal. Porter, (2001) mengemukakan bahwa keunggulan pembangunan dapat tercapai melalui sinergi antar sektor yang saling memperkuat, baik antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Rondinelli, (1981) menambahkan bahwa pembangunan yang efektif membutuhkan koordinasi horizontal dan vertikal agar kebijakan tidak berjalan *terfragmentasi*. Dalam konteks pembangunan desa, teori sinergi menjelaskan pentingnya keterpaduan antara pembangunan fisik (infrastruktur), ekonomi (pemberdayaan), dan sosial (pembinaan). Pembangunan jalan desa, misalnya, tidak akan memberikan dampak signifikan tanpa pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat (Sen, 2014). Oleh karena itu, sinergi pembangunan desa dipahami sebagai proses interaktif di mana setiap elemen saling memperkuat dalam menciptakan keberlanjutan sosial-ekonomi desa.

Kelemahan pendekatan pembangunan sektoral sebelumnya adalah kurangnya koordinasi antar elemen pembangunan. Hal ini sering menyebabkan ketimpangan hasil, duplikasi program, dan rendahnya efisiensi. Teori sinergi menawarkan solusi melalui integrasi kebijakan yang holistik dan partisipatif, di mana interaksi antar elemen menjadi sumber inovasi dan daya ungkit pembangunan.

Komponen Pembangunan Desa dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan kajian teori di atas, pembangunan desa dapat dianalisis melalui tiga komponen utama: infrastruktur (I), pemberdayaan masyarakat (Pm), dan pembinaan kapasitas sosial (Pb). Ketiganya membentuk sistem interaksi yang saling memperkuat dalam mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan. Infrastruktur Desa (I) mencakup sarana transportasi, irigasi, sanitasi, dan fasilitas publik lain yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat desa. Ketersediaan infrastruktur yang baik meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi produksi (World Bank, 2021). Namun, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat agar berdampak berkelanjutan (Escobar, 2011; Muhtar dkk., 2023). Indikator: akses pasar, konektivitas wilayah, dan efisiensi produksi.

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pm) berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya ekonomi, sosial, dan kelembagaan desa (Chambers, 2013; Friedmann, 1992). Program seperti BUMDes merupakan contoh konkret pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Indikator: peningkatan pendapatan, kapasitas manajerial, dan partisipasi warga. Pemberdayaan tanpa infrastruktur kehilangan daya dukung, sedangkan tanpa pembinaan sosial berpotensi menimbulkan ketimpangan. Pembinaan dan Penguatan Kapasitas (Pb) mencakup pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan desa (UNDP, 2022; Sen, 2014). Pembinaan membentuk kesadaran kolektif dan kapasitas sosial yang menopang keberlanjutan pembangunan. Indikator: peningkatan kualitas SDM, partisipasi sosial, dan transparansi tata kelola. Ketiga komponen ini berinteraksi membentuk sistem yang saling bergantung: infrastruktur menjadi fondasi fisik, pemberdayaan sebagai motor ekonomi, dan pembinaan sebagai penjamin keberlanjutan sosial. Hubungan ini menghasilkan efek sinergis yang mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Sintesis Teoretis dan Kebaruan Model

Integrasi antara teori *community-based development*, *sustainable rural development*, desentralisasi, dan sinergi pembangunan menghasilkan model baru yang disebut Model Sinergi Pembangunan Desa Berkelanjutan (MSPDB). Model ini menekankan tiga prinsip utama:

- Partisipasi aktif masyarakat,
- Integrasi multisektoral (I-Pm-Pb), dan
- Keberlanjutan sosial-ekologis.

Kebaruan model ini terletak pada penekanan hubungan interaktif antar komponen pembangunan desa yang saling memperkuat secara simultan. Berbeda dengan model pembangunan klasik yang bersifat sektoral, MSPDB menekankan interaksi dinamis antara dimensi fisik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, teori-teori pembangunan klasik direformulasi menjadi pendekatan sinergis yang relevan dengan konteks kebijakan desa di Indonesia, seperti Dana Desa, BUMDes, dan SDGs Desa (Kementerian Desa, 2023; Sarmadan & Kasim, 2025).

Hubungan Antar Teori, Indikator, dan Arah Model

Sebagai hasil dari sintesis tersebut, diperlukan pemetaan konseptual yang menjelaskan bagaimana teori-teori utama dalam pembangunan desa saling terhubung, membentuk indikator empiris, dan mengarah pada konstruksi Model Sinergi Pembangunan Desa Berkelanjutan (MSPDB). Pemetaan ini penting untuk memperlihatkan jalur logis antara landasan teoritis dan arah model konseptual yang ditawarkan. Dengan menampilkan hubungan teori → indikator → arah model, bagian ini berfungsi untuk menegaskan kontribusi teoritis sekaligus memperkuat validitas konseptual model sinergi. Selain itu, tabel berikut juga menjadi dasar bagi penyusunan *diagram konseptual model* yang menggambarkan keterkaitan antara dimensi infrastruktur, pemberdayaan, dan pembinaan dalam satu sistem pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Tabel 1. Pemetaan Hubungan Teori Utama, Indikator, dan Arah Model Sinergi Pembangunan Desa Berkelanjutan (MSPDB)

Teori Utama	Fokus Utama	Indikator Kunci	Kontribusi terhadap Model Sinergi (MSPDB)
<i>Community-based development</i>	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Tingkat partisipasi, kemandirian, pengelolaan sumber daya lokal	Landasan partisipatif pembangunan desa

(Chambers, 2013; Uphoff, 2005)			
<i>Sustainable rural development</i> (Brundtland, 1987; Todaro & Smith, 2020)	Keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan	Akses sumber daya, pelestarian lingkungan, keberlanjutan ekonomi	Prinsip keberlanjutan pembangunan desa
<i>Desentralisasi dan pembangunan local (Cheema dkk., 1983; Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)</i>	Kemandirian kelembagaan dan otonomi desa	Kewenangan lokal, partisipasi kebijakan, akuntabilitas	Struktur kelembagaan dan kerangka kebijakan pembangunan desa
<i>Sinergi pembangunan</i> (Porter, 2001; Rondinelli, 1981)	Integrasi lintas sektor dan aktor pembangunan	Kolaborasi antar elemen (I-Pm-Pb), koordinasi program	Mekanisme penguat antar sektor dan sumber daya

Sumber: Diolah dari berbagai literatur: Chambers (1983), Uphoff (1999), Brundtland Report (1987), Todaro & Smith (2020), Rondinelli (1981, 2006), Porter (1990), serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahan UU Nomor 3 Tahun 2024.

Tabel ini memperlihatkan bahwa Model Sinergi Pembangunan Desa Berkelanjutan (MSPDB) merupakan hasil integrasi dari teori partisipasi, keberlanjutan, desentralisasi, dan sinergi lintas sektor. Setiap teori berkontribusi terhadap indikator konseptual yang membentuk arah model teoretis pembangunan desa yang komprehensif dan aplikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini

dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman dan sintesis konseptual mengenai sinergi antara infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kapasitas sosial dalam pembangunan desa berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menelaah makna, konsep, serta hubungan antarvariabel secara mendalam berdasarkan sumber-sumber tertulis.

Sebagaimana ditegaskan (Bowen, 2009), analisis dokumen merupakan metode kualitatif yang relevan untuk memahami keterkaitan antara teori dan kebijakan dalam konteks sosial tertentu. Pemilihan metode studi literatur juga dipertimbangkan karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis empiris, tetapi mengintegrasikan teori serta temuan penelitian sebelumnya guna membangun model konseptual baru terkait sinergi pembangunan desa. Justifikasi metodologis tersebut sejalan dengan pandangan Creswell & Poth, (2017) serta Yin, (2015) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berbasis literatur cocok digunakan untuk mengeksplorasi fenomena konseptual dan merumuskan sintesis teoretis dari berbagai sumber.

Sumber Data dan Prosedur Pengumpulan

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, mencakup:

1. Dokumen kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta berbagai Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi terkait pengelolaan Dana Desa dan pembangunan berbasis SDGs (Mulyani, 2022; Sarmadan & Kasim, 2025).
2. Artikel jurnal ilmiah yang membahas teori pembangunan desa, pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, community-based development, serta teori sinergi kebijakan.
3. Laporan resmi dan hasil evaluasi program pembangunan desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta lembaga riset relevan lainnya.
4. Buku dan karya akademik yang menjadi rujukan teori Pembangunan (misalnya (Porter, 2001; Rondinelli, 1981; Todaro & Smith, 2020)).

Secara keseluruhan, penelitian ini menganalisis kurang lebih 52 dokumen yang dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas akademik, dan keterkaitan langsung dengan isu pembangunan desa. Seleksi dilakukan melalui empat tahap:

1. identifikasi sumber melalui database akademik (Google Scholar, Scopus, dan Garuda),
2. penyaringan berdasarkan kata kunci relevan (desa, pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur desa, sinergi kebijakan),
3. eliminasi duplikasi dan sumber yang tidak memenuhi kriteria akademik, serta
4. klasifikasi akhir berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian.

Prosedur Analisis dan Validitas

Analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) dan sintesis konseptual (*conceptual synthesis*). Setiap dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi tema utama yang berhubungan dengan tiga elemen utama pembangunan desa (infrastruktur, pemberdayaan, pembinaan). Proses ini mengikuti tahapan yang disarankan oleh (Braun & Clarke, 2006).

1. *Familiarization* yaitu membaca dan memahami isi dokumen;
2. *Coding* yaitu menandai kata kunci dan konsep inti;
3. *Thematic grouping* yaitu mengelompokkan kode ke dalam tema besar;
4. *Interpretation* yaitu membangun hubungan antar tema dan teori yang relevan;
5. *Synthesis* yaitu mengintegrasikan temuan menjadi model konseptual sinergi pembangunan desa.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi sumber dan *audit trail*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis dokumen (kebijakan, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan buku) untuk memastikan konsistensi temuan. Sementara itu, *audit trail* dilakukan melalui pencatatan sistematis proses seleksi dan analisis sumber, sehingga dapat ditelusuri dan diverifikasi kembali.

Strategi Analisis Sintesis Konseptual

Lima puluh dua dokumen yang dianalisis tidak ditelaah satu per satu secara mendalam, melainkan melalui pengelompokan tematik menjadi tiga klaster utama:

1. Klaster Infrastruktur Desa (15 dokumen)
2. Klaster Pemberdayaan Masyarakat (18 dokumen)
3. Klaster Pembinaan Kapasitas Sosial (19 dokumen)

Ketiga klaster ini kemudian disintesis untuk mengidentifikasi pola keterkaitan dan saling ketergantungan antar elemen, yang menjadi dasar pengembangan model konseptual sinergi pembangunan desa. Dengan pendekatan ini, penelitian tetap mempertahankan fokus analisis tanpa kehilangan kedalaman pemahaman terhadap isu-isu kunci yang muncul dalam literatur. Seluruh tahapan analisis diarahkan untuk menjawab tujuan utama penelitian, yakni merumuskan model konseptual yang menjelaskan bagaimana sinergi antara infrastruktur, pemberdayaan, dan pembinaan dapat memperkuat pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, metode ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis tetapi juga menghasilkan kerangka konseptual yang aplikatif bagi kebijakan pembangunan desa di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan desa yang berkelanjutan bergantung pada integrasi yang efektif antara infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan sosial serta tata kelola. Ketiga elemen ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan sinergis antar-elemen, sekaligus mengungkapkan sejauh mana konsep integratif tersebut telah terwujud dalam kebijakan dan praktik pembangunan desa di Indonesia.

Hasil Sintesis Literatur: Pentingnya Integrasi Tiga Elemen

Dari hasil sintesis terhadap 52 dokumen akademik dan kebijakan, ditemukan bahwa seluruh sumber menempatkan tiga komponen utama yaitu infrastruktur, pemberdayaan, dan pembinaan sebagai fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan. Namun, hanya 36% studi yang menyoroti keterhubungan antar-elemen tersebut secara eksplisit. Temuan ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman teoretis dan kebijakan terkait sinergi antar sektor pembangunan desa.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa integrasi ketiga elemen menghasilkan efek penguatan timbal balik (*mutual reinforcement*). Infrastruktur yang baik memperlancar aktivitas ekonomi, pemberdayaan masyarakat meningkatkan partisipasi dan kapasitas lokal, sedangkan pembinaan memperkuat tata kelola dan keberlanjutan program. Dengan demikian, pembangunan desa yang

efektif hanya dapat dicapai jika ketiga elemen ini diintegrasikan dalam satu sistem kebijakan terpadu.

Analisis Tiap Elemen Pembangunan Desa

1) Infrastruktur Desa (I)

Infrastruktur merupakan fondasi utama dalam memperkuat aksesibilitas, meningkatkan produktivitas, dan mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat desa. Menurut (Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, 2022), pembangunan infrastruktur desa berperan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antarwilayah, ketersediaan energi, dan akses terhadap air bersih. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pembangunan infrastruktur sering dilakukan secara fragmentaris, tanpa keterkaitan dengan pemberdayaan masyarakat maupun pembinaan kelembagaan. Akibatnya, hasil pembangunan fisik tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

2) Pemberdayaan Masyarakat (Pm)

Pemberdayaan merupakan inti dari pembangunan berbasis komunitas. Prinsipnya menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Berdasarkan teori Chambers, (1997), pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, dan kontrol terhadap keputusan pembangunan. Dalam konteks desa, bentuk konkret pemberdayaan mencakup penguatan kelembagaan ekonomi lokal (BUMDes), pelatihan keterampilan, serta akses permodalan. Studi dari Pradana & Fitriyanti, (2019); Setyawan dkk., (2025) menegaskan bahwa keberhasilan BUMDes berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan asli desa dan partisipasi warga. Namun, rendahnya literasi manajerial serta ketergantungan terhadap bantuan eksternal masih menjadi hambatan utama.

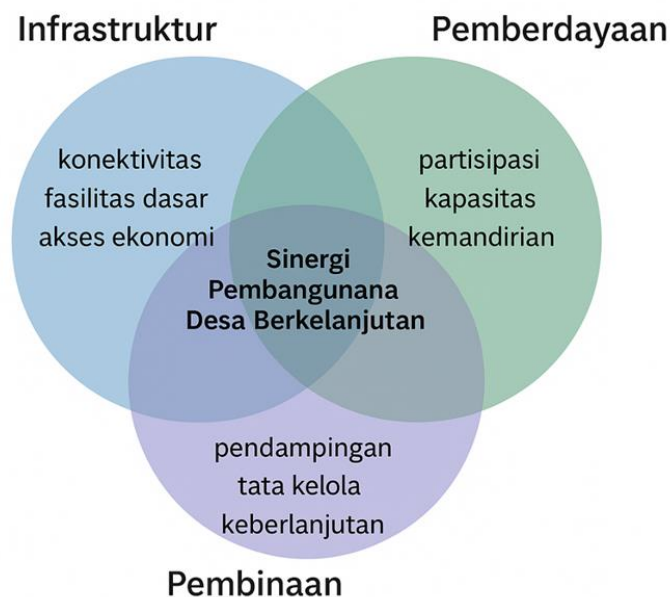
3) Pembinaan dan Tata Kelola Desa (Pb)

Pembinaan berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan tata kelola, serta pengembangan nilai sosial-budaya masyarakat. Data Kementerian Desa, (2023) menunjukkan bahwa 48% desa di Indonesia masih menghadapi kendala dalam aspek perencanaan, pengelolaan keuangan,

dan pelaporan pembangunan. Oleh karena itu, pembinaan menjadi instrumen penting untuk memastikan program infrastruktur dan pemberdayaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan. Pembinaan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa, sehingga meningkatkan transparansi dan efektivitas kebijakan.

Integrasi dan Sinergi Antar-Elemen Pembangunan Desa

Sinergi antara ketiga elemen menjadi poros utama model pembangunan desa yang berkelanjutan. Analisis hasil literatur menunjukkan bahwa hubungan antar-elemen bersifat saling bergantung (interdependent). Infrastruktur tanpa pemberdayaan hanya menghasilkan pertumbuhan fisik tanpa peningkatan kapasitas sosial, sementara pemberdayaan tanpa infrastruktur menimbulkan keterbatasan ekonomi. Di sisi lain, pembinaan berfungsi sebagai “perekat” yang menjamin keberlanjutan dua elemen lainnya. Untuk menggambarkan keterhubungan tersebut, hubungan antar-elemen divisualisasikan melalui diagram Venn berikut:



Gambar 1. Model Sinergi Pembangunan Desa Berkelanjutan

Sumber: Hasil sintesis literatur penelitian (2025), diolah dari Laporan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, (2022); Nurhayati, Lutfi, Pujiriyani, dkk., (2025); Setyawan dkk., (2025)

Matriks Sinergi Antar-Elemen Pembangunan Desa

Untuk memperjelas keterkaitan antar-elemen, penelitian ini menyajikan Matriks Sinergi Pembangunan Desa berikut yang menampilkan hubungan, indikator keberhasilan, dan implikasi kebijakan dari setiap interaksi.

Tabel 2. Sinergi Antar-Elemen Pembangunan Desa

Hubungan Antar Elemen	Indikator Sinergi	Implikasi Teoritis	Implikasi Kebijakan
Infrastruktur ↔ Pemberdayaan	Akses jalan dan fasilitas publik mendorong tumbuhnya BUMDes dan UMKM lokal	Meningkatnya volume produksi, omzet usaha desa, dan serapan tenaga kerja	Integrasi program Dana Desa dengan pelatihan kewirausahaan
Infrastruktur ↔ Pembinaan	Infrastruktur sosial (balai desa, sekolah, posyandu) mendukung kegiatan pembinaan dan pendidikan warga	Tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial meningkat	Pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan sosial masyarakat
Pemberdayaan ↔ Pembinaan	Pelatihan manajemen dan literasi desa memperkuat tata kelola ekonomi lokal	Kapasitas aparatur dan masyarakat meningkat	Penerapan model pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa
I ↔ Pm ↔ Pb (Sinergi Tiga Elemen)	Integrasi antara infrastruktur, pemberdayaan, dan pembinaan menciptakan sistem pembangunan desa holistik	Peningkatan kesejahteraan, partisipasi, dan keberlanjutan program	Kebijakan pembangunan berbasis kolaborasi lintas sektor dan kelembagaan

Sumber: Hasil sintesis literatur penelitian (2025), diolah dari Laporan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, (2022); Chambers, (2013); Kementerian Desa, (2023); Malecki, (2003); Salemin dkk., (2017).

Diskusi Kritis dan Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pembangunan desa tidak dapat disederhanakan sebagai proses fisik semata, melainkan merupakan sistem sosial-ekonomi yang saling terkait. Hasil ini berbeda dengan penelitian-

penelitian terdahulu yang cenderung memisahkan peran masing-masing sektor (Rondinelli, 1981; Todaro & Smith, 2020). Model sinergi yang ditawarkan dalam penelitian ini memperbaharui pendekatan lama dengan mengintegrasikan aspek fisik, sosial, dan tata kelola dalam satu kerangka konseptual pembangunan desa berkelanjutan.

Implikasi praktis dari model ini adalah perlunya reorientasi kebijakan Dana Desa agar tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup kegiatan pemberdayaan ekonomi dan pembinaan kelembagaan secara simultan. Selain itu, penguatan kapasitas pemerintah desa perlu dijadikan prioritas melalui pelatihan berbasis kebutuhan nyata dan evaluasi berkelanjutan (Prabowo & Handayani, 2024). Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya menjadi agenda pembangunan fisik, tetapi juga proses transformasi sosial menuju kemandirian dan keberlanjutan.

SIMPULAN

Pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui integrasi yang efektif antara infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan. Analisis literatur dan sintesis hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga elemen ini saling memperkuat: infrastruktur mendukung kegiatan ekonomi dan akses layanan, pemberdayaan meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, sedangkan pembinaan memastikan tata kelola yang transparan dan keberlanjutan program. Ketiganya, ketika disinergikan, membentuk sistem pembangunan desa yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, yang mampu menjawab kebutuhan sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara komprehensif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi penting baik dari sisi akademik maupun praktik pembangunan desa. Kontribusi ini menegaskan nilai ilmiah dan relevansi kebijakan dari model sinergi yang dikembangkan yakni: a) Kontribusi Ilmiah: Penelitian ini memperkenalkan model sinergi pembangunan desa yang mengintegrasikan aspek fisik, sosial, dan tata kelola dalam satu kerangka konseptual seperti diagram venn dan tabel sinergi antar elemen pembangunan desa. Model ini menyempurnakan penelitian terdahulu yang cenderung memisahkan sektor infrastruktur, pemberdayaan, dan pembinaan; b)

Kontribusi Praktis: Model ini menyediakan dasar bagi kebijakan pembangunan desa yang lebih holistik. Penerapan model sinergi dapat meningkatkan efektivitas program Dana Desa, memberdayakan masyarakat secara nyata, dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Dari temuan penelitian, beberapa langkah strategis dapat diambil untuk mengoptimalkan pembangunan desa. Rekomendasi ini dirancang agar dapat diterapkan secara praktis di tingkat kebijakan maupun pelaksanaan lapangan, serta selaras dengan prinsip integrasi dan sinergi antar-elemen yakni: a) Perencanaan Pembangunan Holistik dan Terpadu: Integrasikan rencana infrastruktur, pemberdayaan, dan pembinaan agar setiap program saling mendukung dan berbasis kebutuhan lokal; b) Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur: Fasilitasi program ekonomi yang memanfaatkan infrastruktur, misalnya pengembangan UMKM lokal dan akses pasar bagi produk desa; c) Peningkatan Pemberdayaan Berbasis Potensi Lokal: Kembangkan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan akses modal sesuai karakteristik dan potensi masing-masing desa; d) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Tingkatkan kapasitas aparat desa melalui pelatihan manajemen, transparansi keuangan, dan evaluasi berkelanjutan; dan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Nilai Sosial-Budaya: Dorong masyarakat aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta pertahankan identitas budaya lokal melalui program pelestarian kesenian dan desa wisata berbasis budaya.

Sejalan dengan tujuan akademik, penelitian ini juga menyadari keterbatasan yang ada. Menyadari batasan ini penting agar interpretasi hasil penelitian tetap hati-hati dan membuka ruang untuk pengembangan lebih lanjut, yakni: a) Analisis terbatas pada literatur dan data sekunder, sehingga kurang menangkap dinamika spesifik antar-desa; b) Tidak semua desa di Indonesia dianalisis secara langsung, sehingga hasil mungkin belum sepenuhnya mewakili kondisi lokal; c) Faktor eksternal seperti politik lokal dan perubahan regulasi kurang dibahas secara mendalam; d) Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan dapat mengembangkan model ini lebih jauh. Fokus riset berikutnya diarahkan untuk menguji dan memperkuat validitas model sinergi di berbagai konteks desa; e) Studi lapangan empiris untuk menguji efektivitas sinergi antar-elemen di berbagai desa dengan karakteristik berbeda; f) Evaluasi dampak jangka panjang terhadap

kesejahteraan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan tata kelola desa. Integrasi faktor eksternal seperti dinamika politik, kebijakan nasional, dan perubahan lingkungan untuk memperkaya model sinergi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Y. N., & Nadida, Z. (2014). Analisis kelembagaan petani dalam mendukung keberfungsian infrastruktur irigasi (Studi kasus: Daerah Irigasi Batang Anai, Sumatera Barat). *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 6(3), 140–221.
- Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, D. T. dan T. (2022). *Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022*. <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2023/04/LKj-Asdep-PMK-4-Tahun-2022.pdf>
- Bank, W. (2021). World development report 2021: *Data for better lives*. The World Bank.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative research journal*, 9(2), 27–40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77–101.
- Brundtland, G. H. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development*. Oxford University Press. <https://www.are.admin.ch/en/1987-brundtland-report>
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts?: putting the first last*.
- Chambers, Robert. (2013). *Rural development : putting the last first*. Routledge.
- Cheema, G. S., Rondinelli, D. A., & Development, U. N. C. for R. (1983). *Decentralization & Development: Policy Implementation in Developing Countries*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=sgEVAQAIAAJ>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=Pz5RvgAACAAJ>
- Dharmaningtias, D. Sendhikasari., Lindawaty, D. Sanur., Dewanti, S. Chaerani., & Eko, Sutoro. (2018). *Tata kelola pembangunan desa*. Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_tim/buku-tim-public-92.pdf
- Diartika, F., & Pramono, R. W. D. (2021). Program pembangunan kawasan perdesaan: Strategi pengembangan desa berbasis keterkaitan desa-kota. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(4), 372–384.
- Doloi, H. K. (2025). Digital Inclusion for Rural Growth: Internet Usage and Smart Villages Development. *Asia-Pacific Journal of Rural Development*, 35(1), 40–57.
- Eriza, F., & Saragih, R. H. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Namo Rambe. *Jurnal Governance Opinion*, 4(1), 16–39.
- Escobar, A. (2011). *Encountering development: The making and unmaking of the Third World*. Princeton University Press.

- Fiyana, B. S. (2025). Farmer Empowerment Innovation in Rural Irrigation Management. *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)*, 4(1).
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. John Wiley & Sons.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Desa. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. www.kemendesa.go.id
- Kunto Arief Wibowo. (6 Maret 2024). Membangun Desa dengan Kemandirian dan Kewilayahan. Kompas.com.
- Malecki, E. J. (2003). Digital development in rural areas: potentials and pitfalls. *Journal of rural studies*, 19(2), 201–214.
- Muhtar, E. A., Abdillah, A., Widianingsih, I., & Adikancana, Q. M. (2023). Smart villages, rural development and community vulnerability in Indonesia: A bibliometric analysis. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2219118>
- Mulyani, N. A. (2022). Program Dana Desa sebagai Wujud Pengentasan Kemiskinan di Daerah Pinggiran. *Jurnal Paradigma Multidisipliner*, 3(2), 474994.
- Nurhayati, N., Lutfi, M. Y., Hidayatullah, N., Wahyuningsih, M., Dizar, S., Octaviani, D., Kusumastuti, S. Y., Sumiyarti, S., Suparyati, A., & Indrianto, A. T. L. (2025). *Desa Berkelanjutan: Implementasi SDGs dalam Pembangunan Desa di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Nurhayati, N., Lutfi, M. Y., Pujiriyani, D. W., Estede, S., Muta'ali, L., Juansa, A., Syafril, R., Irawan, E. P., & Minarsi, A. (2025). *EKONOMI DESA: Strategi Pemberdayaan untuk Pembangunan Berkelanjutan*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Porter, M. E. (2001). The competitive advantage of nations. *Harvard business review*, 68(2), 73–93.
- Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2024). Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 106–122. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94>
- Pradana, H. A., & Fitriyanti, S. (2019). Pemberdayaan dan percepatan perkembangan badan usaha milik desa (bumdes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 133–146.
- Rachmadi, T., Rahayu, T. P., Waluyo, A., & Yuliyanto, W. (2021). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bidang Kesehatan di Desa Rantewringin, Buluspesantren, Kebumen. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 578–589.
- Rahmat, A., Izzudin, A., & Kudir, S. (2015). Memperkuat Pembangunan Desa Berkelanjutan: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Journal of Social Welfare*, 2(2), 88–99.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: theory and practice in developing countries. *International review of administrative sciences*, 47(2), 133–145.

- Salemink, K., Strijker, D., & Bosworth, G. (2017). Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. *Journal of rural studies*, 54, 360–371.
- Sarmadan, S., & Kasim, S. S. (2025). Sinkronisasi Dana Desa dan SDGs dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Desa Andeposandu, Konawe. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 5(1), 241–250.
- Sen, A. (2014). Development as freedom (1999). *The globalization and development reader: Perspectives on development and global change*, 525.
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., Santoso, M. H., & Kalalo, R. R. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Pearson Education. <https://books.google.co.id/books?id=VU0WyQEACAAJ>
- United Nations Development Programme. (2022). Human Development Report 2021-22. <http://report.hdr.undp.org>
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 3 Tahun 2024. Diambil 7 Desember 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6, BPK RI Bidang Hukum Umum (2014)
- Uphoff, N. (2005). *Understanding social capital: learning from the analysis and experience of participation*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:151208453>
- Yin, R. K. (2015). *Qualitative research from start to finish*. Guilford publications.